

PROFESSIONAL PPPKn

Capaian pembelajaran : Mampu menguasai konsep teoretis materi pelajaran PPKn yang diampu secara mendalam meliputi bidang/aspek Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika

Indikator : Mampu memberi contoh penerapan fungsi Pancasila sebagai dasar negara RI

1. Segala tingkah laku dan perbuatan bangsa Indonesia menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Pernyataan tersebut merupakan fungsi Pancasila sebagai
 - a. jiwa bangsa Indonesia
 - b. kepribadian bangsa Indonesia
 - c. janji luhur bangsa Indonesia
 - d. cita-cita bangsa Indonesia
2. Dalam hal menyaring budaya asing maka kedudukan Pancasila berfungsi sebagai ..
 - a. Perjanjian luhur bangsa.
 - b. Etika hidup bangsa
 - c. Filsafat hidup bangsa.
 - d. Jiwa dan kepribadian bangsa.
3. Jelaskan kedudukan dan fungsi pancasila sebagai dasar Negara!
 - a. sebagai pandangan hidup sebuah bangsa.
 - b. kesatuan yang tidak terpisahkan
 - c. pedoman hidup
 - d. semua benar
4. Pancasila sebagai landasan dalam menjalankan pemerintahan Negara berarti pancasila berfungsi sebagai ...
 - a. Ideologi Negara
 - b. Pandangan Hidup bangsa
 - c. Kepribadian bangsa
 - d. Dasar Negara
5. Berikut ini contoh penerapan Pancasila sebagai Dasar Negara di dalam kehidupan sehari-hari, kecuali ...
 - a. Udin rajin melaksanakan shalat 5 waktu
 - b. Kepala Desa Maesa melakukan musyawarah untuk merencanakan kegiatan HUT RI
 - c. Tono bersikap apatis ketika warga lainnya melaksanakan kerja bakti

- d. Hakim memutus suatu perkara dengan tidak berat sebelah

Indikator : Mampu menjelaskan hubungan sila I Pancasila dengan kehidupan beragama di Indonesia

- 6. hubungan sila satu pancasila dengan kehidupan beragama di Indonesia
 - a. Membatasi setiap orang dalam Bergama
 - b. Menjamin penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan beribadah menurut agamanya.
 - c. Membeda beda bedakan tiap agama
 - d. Anarkis dengan agama lain
- 7. Arti dan makna sila pertama Pancasila dibawah ini, kecuali...
 - a. Mengandung arti pengakuan adanya kuasa prima (sebab pertama) yaitu Tuhan yang Maha Esa
 - b. Menjamin berkembang dan tumbuh suburnya kehidupan beragama.
 - c. Bertoleransi dalam beragama, dalam hal ini toleransi ditekankan dalam beribadah menurut agamanya masing-masin, karena pada dasarnya semua agama itu sama dalam segala hal.
 - d. Negara memberi fasilitator bagi tumbuh kembangnya agama dan iman warga negara dan mediator ketika terjadi konflik agama
- 8. Toleransi dalam kehidupan antar umat beragama berarti
 - a. Tersedianya tempat beribadah bagi semua umat beragama dan berdekatan
 - b. Persebaran agama dapat dilakukan kepada siapa saja dan dimana saja
 - c. Menghargai aktivitas inter dan antar umat beragama serta pemerintah
 - d. Setiap agama memiliki tujuan dan cara beribadah yang sama kepada Tuhan

Indikator : Mampu membandingkan prinsip negara hokum formal dan negara hukum material

- 9. Adanya peradilan Tata Usaha Negara disamping peradilan umum dan militer, merupakan salah satu ciri Negara hukum . . .
 - a. Legal
 - b. formal
 - c. material
 - d. positif
- 10. Sebagai penganut sistem negara Hukum Material,Indonesia menerapkan ..
 - a. Sistem pemisahan kekuasaan yudikatif dari kekuasaan eksekutif dan legislatif
 - b. Sistem peradilan yang bebas dan merdeka

- c. Peradilan tata usaha negara
- d. Sistem lembaga bantuan hukum (LBH) yang memihak kepada masyarakat

11. Bacalah dengan seksama pernyataan di bawah ini

- 1. Kekuasaan kehakiman yang bebas dari kekuasaan lain
- 2. Sistem pemerintahannya adalah presidensiil
- 3. Kedaulatan rakyat
- 4. Norma hukum bersumber pada UUD 1945

Berdasarkan pernyataan di atas yang bukan termasuk prinsip – prinsip negara hukum Indonesia adalah

- a. 1 b. 2 c. 3 d. 4

12. Penggolongan hukum menurut sumbernya antara lain adalah.....

- a. Tertulis dan tidak tertulis
- b. Traktat dan yurisprudensi
- c. Lokal dan internasional
- d. Objektif dan subobyektif

13. Keadilan menjadi unsur konstitutif hukum karena

- a. Kesadaran yang tinggi akan ketidakadilan oleh masyarakat
- b. UU yang sesuai dengan prinsip – prinsip keadilan seringkali dianggap sebagai UU yang telah usang dan tidak berlaku lagi
- c. Dengan bertindak adil, suatu pemerintah sebenarnya bertindak di luar wewenang yang tidak sah secara hukum
- d. Pemerintah negara manapun akan membela tindakan dengan memperlihatkan keadilan yang nyata di dalamnya

14. Berikut merupakan pernyataan yang tidak benar mengenai hukum formal dan hukum material adalah

- a. aturan yang mengikat, ada penegak hukum dan sanksi atau aturan perundangannya
- b. hukum yang mengikat atau mengatur tata cara menjalankan dan mempertahankan hukum formal
- c. hukum yang menerapkan prinsip *the rule of law* dan bersifat dinamis
- d. hukum yang mengatur tentang tata cara penegakan hukum materil

15. Indonesia sebagai penganut paham Negara hukum material yang menerapkan prinsip the rule of law, didalam UUD 1945 antara lain diatur bahwa....

- a. Indonesia adalah Negara berdasara atas hukum bukan berdasar atas kekuasaan belaka
- b. Kekuasaan Presiden menjalankan pemerintahan dibatasi oleh Undang-undang

- c. Kekuasaan Negara berada ditangan rakyat dan dijalankan menurut ketentuan Undang-undang Dasar
- d. Setiap warga Negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan wajib menjunjung tinggi hukum dengan tidak ada kecualinya

Indikator : Mampu mengkritisi kelemahan penegakan HAM di Indonesia

16. Menurut Soerjono Soekanto, hukum dapat berfungsi dengan baik diperlukan keserasian antara kepastian hukum dengan kesebandingan hukum merupakan inti penegak hukum, maka penegakan hukum sesungguhnya dipengaruhi oleh, kecuali
- a. Hukum itu sendiri
 - b. Kekuatan penegak hukum
 - c. Taraf kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat
 - d. Fasilitas yang diharapkan untuk mendukung pelaksanaan hukum
17. Hambatan penegakan HAM di Indonesia yang berupa prinsip sipil antara lain ...
- a. Masih lemahnya kesadaan hukum bagi masyarakat
 - b. Masih rendahnya keberanian masyarakat untuk melapor pelanggaran HAM
 - c. Hakim tidak dapat menentukan kesimpulan pelanggaran HAM
 - d. Belum adanya jaksa penuntut yang berpengalaman menanganinya
18. Faktor – faktor yang menyebabkan permasalahan dalam penegakan hukum di Indonesia antara lain:
- a. Campur tangan politik
 - b. Peraturan perundangan yang lebih berpihak kepada kepentingan penguasa dibandingkan kepentingan rakyat
 - c. Kedewasaan berpolitik
 - d. Rendahnya integritas moral
 - e. Tingginya kredibilitas
 - f. Kesadaran hukum aparat penegak hukum
- Berdasarkan pernyataan di atas, yang bukan termasuk faktor - faktor yang menyebabkan permasalahan dalam penegakan hukum di Indonesia yaitu
- a. b dan a
 - b. hanya e
 - c. c dan b
 - d. c dan e

Indikator : **Mampu menerapkan prinsip-prinsip nasionalisme dan integrasi nasional dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Indonesia**

19. Tugas membela negara wajib dilakukan oleh seluruh warga negara Indonesia, Karena
- Setiap warga negara memiliki hutang kepada negara dalam bentuk pelayanan pemerintah terhadap warga negara
 - Warga negara adalah tulang punggung negara
 - Manusia di samping sebagai makhluk pribadi juga sebagai makhluk sosial bernegara
 - Negara tidak akan kokoh jika tidak adanya persatuan, kesatuan dan partisipasi seluruh warganya
20. Masyarakat Indonesia yang beraneka ragam dalam faktor-faktor kesukubangsaan dengan masing-masing kebudayaan daerahnya, bahasa daerah, agama yang dianut, ras dan sebagainya, merupakan...
- Faktor pendukung Integrasi Nasional
 - Faktor penghambat Integrasi Nasional
 - Sebab adanya Integrasi Nasional
 - Akibat adanya Integrasi Nasional
21. Prinsip-prinsip nasionalisme indonesia sebagai berikut , kecuali...
- Kesatuan sejarah; yaitu bangsa Indonesia tumbuh dan berkembang dalam suatu proses sejarah.
 - Kesatuan nasib; yaitu berda dalam satu proses sejarah yang sama dan mengalami nasib yang sama yaitu dalam penderitaan penjajah dan kebahagiaan bersama.
 - Kesatuan kebudayaan; yaitu keanekaragaman kebudayaan tumbuh menjadi suatu bentuk kebudayaan nasional.
 - Kesatuan cita-cita; yaitu adanya cita-cita atau nilai luhur yang dianggap bisa dijadikan sebagai satu kesatuan harapan yang harus diwujudkan bersama-sama

Indikator : **Mampu membandingkan sistem pemerintahan negara federal dan sistem pemerintahan dengan azas desentralisasi**

22. Berikut adalah pernyataan mengenai sistem Negara federal dan Negara desentralisasi :
- (1) tiap negara bagian memiliki kepala negara, parlemen, dewan kementerian demi kepentingan negara bagian

(2) hal-hal yang menyangkut negara dalam keseluruhannya diserahkan kepada kekuasaan pemerintah di wilayah.

(3) pembangunan wilayahnya berkembang sesuai dengan ciri khas nya

(4) negara bagian dapat membuat konstitusi sendiri, tetapi tidak bertentangan dengan konstitusi negara serikat

(5) peraturan dan kebijakannya sesuai dengan kondisi wilayah itu sendiri

Pernyataan yang benar mengenai Negara yang menganut sistem federal adalah

- a. 1,2 b. 2,5 c. 3,5 d. 1,4

23. Dibawah ini merupakan perbedaan pemerintahan negara yang berazas desentralisasi dengan negara federal, kecuali.....

- a. Segenap urusan-urusan negara kesatuan tidak dibagi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, sedangkan negara federal segala urusan negara bagian menjadi tanggungjawab pemerintah negaranya masing-masing tetapi pemegang konstitusi tertinggi adalah negara serikat.
- b. Setiap negara bagian berwenang membuat UUD sendiri selama tidak bertentangan dengan negara serikat, sedangkan negara kesatuan hanya mempunyai satu UUD, satu kepala negara, satu dewan menteri dan satu dewan perwakilan rakyat.
- c. Pada negara bagian hak otonom itu merupakan hak negara federal, sedangkan pada daerah otonom hak itu diperoleh dari pemerintah daerah.
- d. Kedaulatan negara kesatuan mencakup ke dalam dan ke luar yang di tangani pemerintah pusat. Sedangkan tiap negara bagian mempunyai kekuasaan sendiri namun kedaulatan asli tetap pada Negara federal.

Indikator : Mampu mengidentifikasi faktor-faktor penyebab melemahnya kerukunan hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia dalam kehidupan masyarakat yang multikultur

24. Ciri utama multikkulturalisme di bawah ini, kecuali

- a. kebutuhan terhadap pengakuan
- b. legitimasi keanekaragaman budaya
- c. setiap manusia harus memiliki kebebasan maksimal
- d. pluralisme budaya.

Indikator : Mampu menerapkan prinsip dan nilai-nilai pascamodern abad globalisasi untuk memajukan kehidupan masyarakat Indonesia yang multikultur

25. Kerasnya pengaruh nilai – nilai budaya global.sejalan dengan proses modernisasi masyarakat tentu saja menimbulkan masalah – masalah sosial. adapun masalah sosial yang timbul sebagai dampak negative globalisasi antara lain, kecuali....
- Meningkatkan arus urbanisasi
 - Masuknya budaya asing menambah khasanah budaya nasional
 - Semakin tajamnya kesenjangan sosial
 - Terjadinya perubahan struktur sosial dalam masyarakat
26. Sikap yang perlu dikembangkan dalam menghadapi pengaruh budaya asing yaitu
- Menerima secara selektif
 - Melarang keluarga menonton tv
 - Menutup diri dari pengaruh budaya asing
 - Menjauhkan diri dari perkembangan Iptek

Capaian Pembelajaran : Mampu memilih dan meng gunakan fakta dan peris-tiwa sosial kewarganegara an sebagai laboratorium PPPKn di masyarakat untuk pengembangan materi PPPKn

Indikator : Mampu memilih dengan argumentasi yang benar fakta dan peristiwa sosial kewarganegaraan yang dapat dijadikan pengembangan materi PPKn

27. Konflik yang timbul dalam keberagaman masyarakat masih terus terjadi di berbagai wilayah. Hal ini disebabkan oleh
- Bhineka Tunggal Ika belum terlaksana dengan baik
 - Belum terpatrynya NKRI dalam hati sanubari masyarakat
 - Belum terbangun jiwa patriotism pada warga
 - Belum mampu menjaga nama baik Pancasila

Capaian Pembelajaran : Mampu mengidentifikasi dan memecahkan masalah -masalah dalam memba-ngun kepribadian nasional dan demokrasi konstitusi-onal Indonesia, semangat kebangsaan dan cinta tanah air serta bela negara.

Indikator : Mampu mengkritisi kelemahan utama pengembangan sistem

28. Dibawah ini yang termasuk landasan konstitusional politik luar negeri indonesia adalah

.....

- a. pembukaan UUD 1945 alinea I
- b. pembukaan UUD 1945 alinea II
- c. Pembukaan UUD 1945 alinea III
- d. pembukaan UUD 1945 alinea IV

29. Perhatikan pernyataan – pernyataan di bawah ini:

- 1) Timbul persaingan antar individu untuk maju.
- 2) Kebebasan individu yang dijunjung tinggi.
- 3) Kekuasaan pemerintah yang tak terbatas.
- 4) Tingkat pendapat penduduk semakin rendah.
- 5) Terjadi gejolak perekonomian.
- 6) Pemerintah menduduki kekuasaan tertinggi.

Dari pernyataan di atas yang merupakan ciri-ciri demokrasi konstitusional adalah...

- a. 1, 4, dan 5 salah
- b. 1,3, dan 6 salah
- c. 3, 5, dan 6 benar
- d. 1,2, dan 5 benar

30. Kelemahan atau kekurangan dari demokrassi yang dianut oleh Negara kita adalah

- a. Pemerintah demokrasi di dasarkan pada keinnginan publik dan tidak didasarkan pada ketakutan pada penguasa
- b. Demokrasi berdiri di atas konsesnsus, bukan pada kekuasaan
- c. Demokrasi tidak didasarkan pada kualitas tetapi pada kuantitas
- d. Demokrasi dianggap lebih stabil daripada bentuk pemerintahan lain

Capaian Pembelajaran : Mampu menyusun usulan kebijakan public untuk perlindungan, pemajuan HAM, serta penegakan hu-kum secara adil dan benar

Indikator : Mampu menilai kelemahan usulan kebijakan publik untuk perlindungan, pemajuan HAM, serta penegakan hukum secara adil.

31. Pelaksanaan HAM dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di indonesia didasarkan pada prinsip-prinsip. Berikut ini yang tidak termasuk dalam prinsip-prinsip HAM di Indonesia adalah:

- a. Pemberantasan dan penghukuman tindak pidana apartheid
 - b. Pelaksanaan HAM bersifat relatif, tidak mutlak karena di batasi oleh hak asasi orang lain
 - c. Kerjasama internasional berdasarkan prinsip saling menghormati, persamaan derajat, dan hubungan baik antar bangsa
 - d. Keseimbangan antara hak dan kewajiban
32. Penegakan HAM pada dasarnya tidak dapat terpisahkan dari pertimbangan hukum dan politik. Namun demikian, prinsip yang hendaknya dijadikan acuan pertimbangan dalam penegakan HAM tidak boleh mengorbankan kepentingan ...
- a. Nasional
 - b. Pemerintah
 - c. Kolegial
 - d. Lokal
33. Pelanggaran HAM tidak saja dapat dilakukan oleh negara (pemerintah), tetapi juga oleh suatu kelompok, golongan, ataupun individu terhadap kelompok, golongan, atau individu lainnya. Selama ini perhatian lebih banyak difokuskan pada pelanggaran HAM yang dilakukan oleh negara, sedangkan pelanggaran HAM oleh warga sipil mungkin jauh lebih banyak, tetapi kurang mendapatkan perhatian. Oleh sebab itu perlu ada kebijakan tegas yang mampu menjamin dihormatinya HAM di Indonesia.

Hal ini perlu dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan negara.
2. Menegakkan hukum secara adil, konsekuen, dan tidak diskriminatif.
3. Meningkatkan kerja sama yang harmonis antarkelompok atau golongan dalam masyarakat agar mampu saling memahami dan menghormati keyakinan dan pendapat masing-masing.
4. Melakukan Kerjasama internasional berdasarkan prinsip saling menghormati, persamaan derajat, dan hubungan baik antar bangsa
5. Memperkuat dan melakukan konsolidasi demokrasi.

Langkah-langkah diatas benar kecuali...

- a. 1,2
- b. 3,4
- c. 5 saja
- d. 4 saja

Capaian pembelajaran : Mampu berperilaku baik sesuai prinsip, nilai, moral, dan norma kewarga-negaraan Indonesia yang demokratis dalam konteks kewargaan negara dan dunia

Indikator : **Mampu memberikan argumen nilai yang kuat tentang pentingnya perilaku demokratis dalam konteks kewarganegaraan**

34. Perhatikan uraian di bawah ini!

- 1) Kesembangan antara hak dan kewajiban
- 2) Kebebasan yang tidak terbatas
- 3) Kebebasan berkumpul dan berserikat
- 4) Keadilan sosial
- 5) Kekeluargaan dan persatuan nasional
- 6) Mengutamakan kesukuan

Berdasarkan uraian di atas, yang termasuk prinsip demokrasi pancasila yaitu nomor...

- a. 1,2 dan 3
- b. 1,3 dan 4
- c. 3,4 dan 5
- d. 4,5 dan 6

